

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah mewajibkan pendidikan selama 12 tahun. Pendidikan selama 12 tahun itu terhitung sejak SD selama enam tahun, SMP tiga tahun dan SMA/SMK tiga tahun. Pada jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) peserta didik diberikan bekal kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia industri, sehingga diharapkan ketika menyelesaikan pendidikannya mereka dapat langsung bekerja.

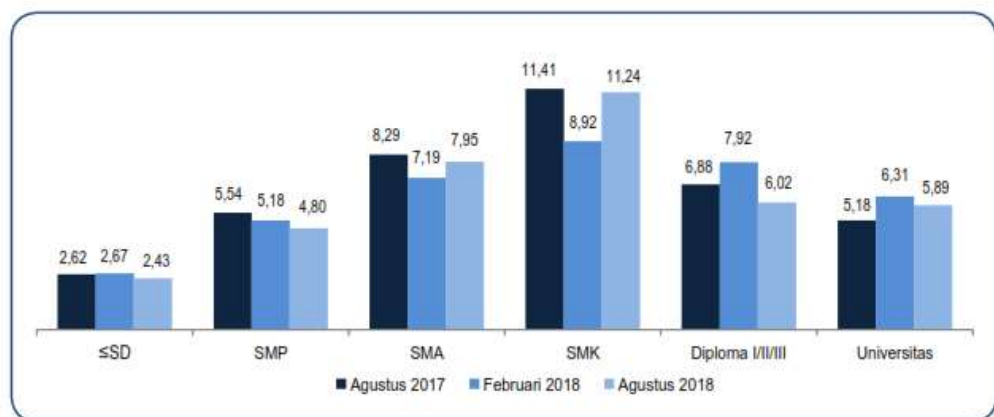
SMK adalah pendidikan formal yang memiliki pola pelatihan khusus untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi lulusan yang siap bekerja dalam dunia industri. Misi utama SMK adalah untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Keberadaan SMK dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan tenaga kerja. Sehingga peserta didik dituntut memiliki keterampilan serta sikap professional dalam bidangnya.

Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 dijelaskan bahwa: “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada

bidang tertentu”. Sebagai tindak lanjut dari implementasi undang-undang di atas, maka perlu dikembangkannya pendidikan kejuruan di Indonesia.

Menurut Depdikbud, SMK memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan siswa-siswi untuk memasuki lapangan pekerjaan serta mengembangkan sikap profesional.
2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri.
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan atau untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produkti, adaptif, dan kreatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2017-Agustus 2018 menurut Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tercatat SMK mendominasi dalam hal TPT (Tingkat Pengangguran

Terbuka) yaitu sebesar 11.24% jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain yaitu SMA sebesar 7.95%, SMP sebesar 4.80% dan SD sebesar 2.43%. Berdasarkan data dari BPS tersebut maka diperlukannya peningkatan mutu SMK, dengan adanya peningkatan mutu SMK maka diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah dalam memasuki dunia kerja serta dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah seluruh Kabupaten Kulon Progo terdapat 30 SMK yang terdaftar baik berstatus swasta ataupun negeri. Untuk nilai akreditasi dari SMK yang terdaftar tersebut berupa akreditasi A sebanyak 13 sekolah, akreditasi B sebanyak 15 sekolah dan yang berakreditasi C sebanyak 2 sekolah. Nilai akreditasi tertinggi diperoleh SMK Muhammadiyah 1 Temon dengan nilai 96 dan akreditasi terendah diperoleh SMK Veteran Wates dengan nilai 62.

(http://bansm.or.id/sekolah/sudah_akreditasi/3 diakses 20 januari 2017 pukul 07.00 WIB)

Kurangnya SNP berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional yaitu Standar isi dengan nilai ≤ 85 terdapat 9 sekolah, Standar proses terdapat 19 sekolah, Standar kompetensi terdapat 24 sekolah, Standar tenaga kependidikan terdapat 29 sekolah, Standar sarana dan prasarana terdapat 22 sekolah, Standar pengelolaan terdapat 21 sekolah, Standar biaya terdapat 13 sekolah, dan Standar nilai terdapat 13 sekolah.

Akreditasi sekolah dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan dirubah kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat 8 standar yang ditentukan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) merintis pengembangan model sekolah menengah kejuruan yang disebut SMK Rujukan. Pengembangan SMK Rujukan tersebut dimulai sejak tahun 2016 yaitu dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 705/D.52/KP/2016 tentang Penetapan SMK yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Menjadi SMK Rujukan. Sejak dikeluarkannya SK tersebut sekolah rujukan sudah melalui banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK salah satunya yaitu membuat SDP (*School Development Plan*)

gunanya SDP tersebut untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan sekolah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mengembangkan sekolah.

SMK Rujukan yaitu suatu model sekolah yang dapat dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya dalam berbagai komponen sekolah yang untuk memperkuat pengembangan SMK Rujukan antara lain melalui upaya: (1) peningkatan layanan kejuruan, (2) peningkatan manajemen sekolah, (3) peningkatan kualitas proses pembelajaran, (4) peningkatan sarana dan prasarana, (5) peningkatan kompetensi lulusan dan, (6) pembinaan SMK sebagai pusat pelatihan.

Salah satu syarat bisa dijadikan SMK rujukan adalah terpenuhinya SNP (Standar Nasional Pendidikan). Ada delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan. Selain terpenuhi SNP sekolah rujukan juga harus memiliki ekosistem sekolah yang kondusif, budaya mutu dan penumbuhan karakter.

Pada sekolah rujukan terdapat program pengimbasan yaitu suatu program dari sekolah rujukan untuk mengantarkan sekolah imbas memenuhi indikator standar nasional pendidikan, mengembangkan potensi sekolah imbas melebihi SNP dan meningkatkan keunggulan-keunggulan

lain sesuai dengan potensi sekolah imbas. Selain hal tersebut pengimbasan juga untuk meningkatkan mutu sekolah, penguatan pendidikan karakter disekolah, meningkatkan ekosistem pendidikan yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar disekolah dan hal lain yang dibutuhkan oleh sekolah imbas. Peningkatan mutu pendidikan sangat perlu ditingkatkan oleh sekolah imbas karena pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif yang diharapkan dapat mengembangkan budaya dan karakter generasi muda bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat memperkecil atau mengurangi penyebab terjadinya berbagai masalah kemerosotan budaya dan karakter bangsa (Amat Jaedun dkk, 2014). Program pengimbasan ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah rujukan tetapi juga sekolah model yang memang istilah sekolah model sejalan dengan sekolah rujukan.

Berdasarkan wawancara terstruktur dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pengasih diketahui bahwa program pengimbasan sudah dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Pengasih sejak tahun 2017. Pelaksanaan pengimbasan tersebut dibantu oleh pihak LPMP. Dalam pengimbasan tersebut terdapat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tujuan dari adanya pengimbasan adalah sekolah memberikan materi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah rujukan. Dengan adanya pengimbasan diharapkan sekolah imbas dapat menerapkan materi-materi yang diberikan oleh sekolah rujukan. Materi pengimbasan yang diberikan yaitu mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tri

pusat pendidikan dan program unggulan di sekolah rujukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32 tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan setiap satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Materi pengimbasan lainnya yaitu mengimbaskan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diterapkan dengan memiliki tujuan peserta didik dapat secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan yang sebenarnya (Gunadi Dkk, 2014). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh sekolah rujukan. Kepala sekolah menjelaskan pengimbasan kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan sasaran sekolah yang diimbaskan yaitu sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013.

SMK N 2 Pengasih berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional telah memenuhi 8 standar nasional yang ditetapkan sehingga akreditasi sekolahnya menjadi A dengan nilai 90. Sedangkan dari 30 SMK yang ada di Kulon Progo sebanyak 56% sekolah akreditasinya belum mencapai A. Sekolah dengan akreditasi B sebanyak 15 sekolah dan sekolah berakreditasi C sebanyak 2 sekolah. Dengan nilai tersebut SMK N 2 Pengasih berhak untuk melaksanakan program pengimbasan pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo terutama pada

sekolah yang akreditasi dan SNP-nya belum terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan SK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 705/D.52/KP/2016 tentang Penetapan SMK yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Menjadi SMK Rujukan, SMK Negeri 2 Pengasih masuk dalam daftar SMK yang berpotensi menjadi SMK rujukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengimbasan di SMKN 2 Pengasih, program apa saja yang dilakukan, bagaimana cara melakukan pengimbasan di sekolah tersebut, dan bermaksud menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Keberhasilan Program Pengimbasan di SMK”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul anatar lain:

1. Masih adanya sekolah yang berakreditasi C di Kabupaten Kulon Progo yaitu 2 sekolah, 15 sekolah berakreditasi B dan 13 sekolah sudah berakreditasi A. Perbedaan akreditasi ini disebabkan oleh terpenuhi atau tidaknya SNP dari masing-masing sekolah yang ada
2. Kurangnya SNP yang paling banyak terdapat pada sektor tenaga kependidikan, kompetensi dan juga sarana & prasarana disekolah. Untuk standar tenaga kependidikan terdapat 29 sekolah dengan nilai

kurang dari ≤ 85 dan ada sebanyak 12 sekolah dengan nilai ≤ 76 , standar kompetensi terdapat sebanyak 24 sekolah yang masih mendapat nilai sebesar ≤ 85 dan terdapat 6 sekolah dengan nilai ≤ 76 dan untuk standar sarana dan prasarana sebanyak 22 sekolah dengan nilai ≤ 85 dan terdapat 9 sekolah dengan nilai ≤ 76 .

3. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh rendahnya lapangan kerja atau rendahnya daya serap tenaga kerja dan juga bisa disebabkan oleh mutu SMK yang masih belum mencukupi sesuai yang diharapkan oleh dunia kerja. Perlunya peningkatan mutu SMK agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini pembatasan masalah dimaksudkan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan tingkat kedalaman penelitian secara maksimal sehingga pembahasannya dapat terarah dan tepat mengenai sasaran. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu tidak adanya informasi mengenai perencanaan program pengimbasan, pelaksanaan program pengimbasan dan evaluasi program pengimbasan. Masalah tersebut menjadi fokus dari penelitian mengingat bahwa SMK Negeri 2 Pengasih yang telah melaksanakan program pengimbasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?
2. Bagaimana pelaksanaan program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?
3. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan program pengimbasan oleh SMK?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendorong untuk melaksanakan pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?
5. Apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan pengimbasan di SMK N 2 Pengasih
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengimbasan di SMKN 2 Pengasih
3. Untuk mengetahui hasil evaluasi program pengimbasan di sekolah
4. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong program pengimbasan di SMKN 2 Pengasih.
5. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat program pengimbasan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil produk penelitian ini, peneliti mengharapkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk satu pihak, namun juga beberapa pihak yang terkait yaitu sekolah, pembaca dan penelitian selanjutnya.

1. Bagi SMK

Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah untuk mengevaluasi program pengimbasan dan mengembangkan program pengimbasan yang sudah terlaksana.

2. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui bagaimana pola pengimbasan di SMK rujukan kepada SMK binaan. Selain itu dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan peneliti yang didapatkan selama di masa perkuliahan.

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi dalam bidang pendidikan bagi mahasiswa ataupun dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan mengenai masalah yang sejenis